

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penciptaan Karya

Ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah perkotaan masih menjadi persoalan fundamental bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok pekerja informal. Mereka kerap berada dalam posisi rentan dengan pendapatan yang tidak stabil, minim perlindungan sosial, serta akses yang terbatas terhadap layanan dasar termasuk pendidikan. Salah satu profesi dalam sektor ini adalah juru parkir, yang sebagian besar dipersepsikan sebagai pekerjaan berstatus sosial rendah dan identik dengan ekonomi marginal. Stereotip tersebut sering menutup kemungkinan bahwa para pelakunya memiliki kemampuan dan aspirasi untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan.

Pekerja informal sering menghadapi hambatan struktural yang signifikan dalam mengakses pendidikan tinggi, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka dan kondisi perekonomian keluarga. Setyanti (2020) menjelaskan bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih banyak terserap dalam sektor informal dibandingkan pekerja berpendidikan tinggi, studi ini menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka bekerja di sektor informal, sementara individu dengan pendidikan dasar atau menengah lebih mendominasi sektor informal di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan menjadi faktor yang memperkuat keterbatasan akses terhadap peluang pendidikan lanjutan, sehingga pendidikan tinggi tampak seperti sebuah *privilege* yang lebih mudah diakses oleh kelompok dengan modal ekonomi dan sosial yang kuat. Selain itu, pengaruh faktor ekonomi terhadap dinamika pekerjaan informal dan kemiskinan juga tercermin dalam temuan Taufiq dan Dartanto (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peluang pekerja informal keluar dari sektor informal dan mengurangi risiko kemiskinan jangka panjang karena lebih banyak peluang kerja formal dan penghasilan yang lebih tinggi. Fenomena ini memperkuat bahwa perjuangan seorang juru parkir yang tetap berupaya menyelesaikan pendidikan tinggi, meskipun menghadapi beban ekonomi dan tekanan sosial, merupakan representasi nyata dari upaya untuk menembus batasan struktural tersebut dan memaknai pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial yang penting. Pandangan tersebut diperkuat oleh Suryahadi, dkk. (2020) yang menyoroti bahwa kerentanan ekonomi pekerja informal semakin meningkat dalam situasi krisis, sehingga mempersempit ruang mereka untuk mengakses pendidikan.

Ketidakstabilan pendapatan membuat pekerja informal berada pada posisi rentan terhadap guncangan ekonomi, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk tetap bertahan di sektor informal tanpa peluang peningkatan kapasitas pendidikan. Dalam konteks ini, upaya individu pekerja informal yang tetap berjuang menempuh pendidikan tinggi seperti juru parkir yang melanjutkan studi sarjana menjadi representasi dari perlawanan terhadap keterbatasan struktural tersebut. Perjuangan ini tidak hanya mencerminkan motivasi personal, tetapi juga menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai sarana penting untuk mobilitas sosial dan upaya keluar dari kemiskinan struktural. Dengan demikian, fenomena pekerja informal yang menempuh pendidikan tinggi menegaskan bahwa akses pendidikan bukan semata persoalan kemampuan individu, melainkan juga terkait erat dengan struktur sosial-ekonomi yang melingkupinya.

Juru parkir merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat perkotaan, khususnya di kota-kota dengan kepadatan ruang publik yang tinggi seperti Yogyakarta. Sebagai kota wisata dan kota pendidikan, Yogyakarta memiliki intensitas pergerakan kendaraan yang tinggi di kawasan perdagangan, destinasi wisata, pusat kuliner, serta lingkungan kampus, sehingga keberadaan juru parkir baik yang berada di bawah pengelolaan resmi maupun yang bersifat swadaya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kota. Keberadaan mereka berperan dalam membantu keteraturan penggunaan ruang parkir dan kelancaran aktivitas ekonomi lokal, namun dalam praktiknya profesi juru parkir kerap berada dalam kondisi rentan karena sebagian besar beroperasi di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, tanpa kontrak kerja, serta minim perlindungan dan jaminan sosial. Setyanti (2020) menyatakan bahwa pekerja sektor informal di Indonesia umumnya didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah, yang menyebabkan terbatasnya akses mereka ke pekerjaan formal dan memperkuat ketergantungan pada pekerjaan informal sebagai strategi bertahan hidup. Kondisi tersebut juga terlihat pada fenomena juru parkir di Yogyakarta, yang banyak berasal dari kelompok masyarakat urban marginal dan bergantung pada penghasilan harian yang sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi, musim wisata, serta kebijakan penataan kota. Suryahadi, Izzati, dan Suryadarma (2020) menegaskan bahwa kerentanan ekonomi pekerja informal membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi, sehingga harus berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi perkotaan. Dengan demikian, fenomena juru parkir di Yogyakarta tidak hanya mencerminkan persoalan pekerjaan informal semata, tetapi juga menunjukkan ketimpangan struktural dalam akses kerja layak dan perlindungan sosial di ruang kota.

Pekerja informal di Kota Yogyakarta juga banyak melibatkan mahasiswa sebagai subjek utama, terutama mengingat karakter Yogyakarta sebagai kota pendidikan dengan populasi mahasiswa yang besar dan beragam latar belakang sosial ekonomi. Mahasiswa yang bekerja sebagai juru parkir, pedagang kaki lima, atau pekerja jasa harian umumnya terdorong oleh kebutuhan ekonomi untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari, di tengah keterbatasan dukungan finansial keluarga. Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY, 2025) menunjukkan sebanyak 1,15 juta orang atau 52,88 persen dari 2,24 juta jumlah angkatan kerja di D.I Yogyakarta berada di sektor informal dan data ini menunjukkan bahwa sektor informal di wilayah Yogyakarta menjadi ruang vital bagi kelompok usia muda untuk memperoleh pendapatan, meskipun pekerjaan tersebut ditandai oleh jam kerja panjang, pendapatan tidak menentu, serta ketiadaan jaminan sosial. Dalam kajiannya, Chen (2012) menegaskan bahwa sektor informal kerap menjadi pilihan rasional bagi kelompok muda dan pelajar karena fleksibilitas waktu kerja yang memungkinkan mereka membagi peran antara pendidikan dan pekerjaan, meskipun pada saat yang sama menempatkan mereka dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks mahasiswa di Yogyakarta, keterlibatan dalam sektor informal mencerminkan strategi bertahan hidup sekaligus respons terhadap ketimpangan akses kesempatan kerja formal bagi mahasiswa dari kelas sosial menengah ke bawah, sehingga memperlihatkan irisan antara persoalan ketenagakerjaan, pendidikan, dan ketidaksetaraan struktural di ruang perkotaan.

Stigma negatif terhadap juru parkir dipengaruhi oleh praktik-praktik menyimpang yang dalam sejumlah kasus dilakukan oleh oknum pelaku di lapangan. Praktik tersebut antara lain berupa pemungutan tarif yang melebihi ketentuan resmi tanpa disertai layanan parkir yang memadai, tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran, melakukan pungutan liar, mengelola parkir di lokasi yang tidak memiliki izin (parkir liar), hingga tindakan yang bersifat seperti praktik premanisme. Selain itu, pelanggaran juga kerap terjadi pada area yang secara jelas mencantumkan kebijakan parkir gratis, seperti di sejumlah minimarket atau fasilitas tertentu, namun tetap dilakukan penarikan biaya oleh pihak yang tidak berwenang. Secara normatif, pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi tersebut diatur definisi dan klasifikasi tempat parkir, baik parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir, penetapan struktur dan besaran tarif retribusi parkir berdasarkan jenis kendaraan dan zona kawasan, kewajiban pembayaran retribusi sesuai tarif yang telah ditentukan, serta prinsip penetapan tarif yang mempertimbangkan biaya

penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik pemungutan parkir pada dasarnya memiliki dasar hukum yang jelas dan terstandarisasi.

Namun, ketika terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, publik cenderung melakukan generalisasi terhadap profesi juru parkir secara keseluruhan. Akibatnya, stigma yang terbentuk tidak lagi membedakan antara praktik individual yang menyimpang dan realitas mayoritas pekerja yang menjalankan tugas sesuai aturan. Dalam konteks mahasiswa yang bekerja sebagai juru parkir, hal ini menjadi beban sosial tambahan yang dapat memengaruhi citra diri, legitimasi sosial, serta cara masyarakat memandang kapasitas dan aspirasi pendidikan mereka. Kondisi tersebut kemudian melahirkan stigma negatif masyarakat terhadap pekerja informal termasuk juru parkir yang kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan kelas bawah, tidak produktif, serta identik dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Satriawan (2023) menjelaskan bahwa stigma ini berakar pada konstruksi sosial yang memposisikan pekerjaan formal sebagai simbol keberhasilan dan mobilitas sosial, sementara pekerjaan informal dipahami sebagai bentuk kegagalan individu dalam mengakses pendidikan dan pasar kerja formal. Pandangan tersebut diperkuat oleh representasi media dan wacana publik yang sering menyoroti pekerja informal dalam konteks pelanggaran aturan, ketidaktertiban, atau konflik ruang publik, sehingga mengaburkan kontribusi nyata mereka dalam menopang aktivitas ekonomi sehari-hari. Akibatnya, pekerja informal tidak hanya mengalami marginalisasi ekonomi, tetapi juga marginalisasi simbolik, yakni dipandang sebelah mata, kurang dihargai secara sosial, dan jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik. Hidayat dan Nugroho (2021) menambahkan bahwa stigma sosial semacam ini dapat berdampak psikologis, seperti menurunnya kepercayaan diri dan rasa percaya akan masa depan, terutama bagi pekerja informal usia muda atau mahasiswa yang masih berada dalam proses membangun identitas dan mobilitas sosial. Dalam jangka panjang, stigma negatif terhadap juru parkir dan pekerja informal lainnya turut mempersempit peluang mereka untuk mengakses pendidikan, jejaring sosial, serta kesempatan ekonomi yang lebih layak, sehingga memperkuat siklus ketimpangan sosial di perkotaan.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya melalui penegakan regulasi terhadap praktik parkir yang menyimpang, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, transparansi sistem retribusi, serta pembinaan terhadap juru parkir agar praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, upaya kultural juga menjadi penting, yakni melalui pembentukan narasi publik yang lebih adil dan proporsional terhadap pekerja informal. Dalam konteks inilah media, khususnya

film dokumenter memiliki peran strategis untuk menghadirkan representasi yang lebih manusiawi, membedakan antara praktik menyimpang dan realitas perjuangan mayoritas pelaku, serta membuka ruang empati terhadap juru parkir yang berupaya meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Representasi yang selama ini cenderung menekankan sisi pelanggaran perlu diimbangi dengan pengungkapan realitas perjuangan, kontribusi ekonomi, serta aspirasi pendidikan yang dimiliki oleh para pelakunya. Dengan demikian, solusi atas stigma tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi simbolik dan sosial yang membentuk cara masyarakat memahami profesi juru parkir.

Film dokumenter *Antara Jalan dan Harapan* mengangkat kisah seorang juru parkir yang berstatus sebagai mahasiswa dan berjuang menempuh pendidikan tinggi di tengah tekanan ekonomi serta keterbatasan struktural yang melekat pada sektor pekerjaan informal. Melalui pendekatan naratif-visual yang menempatkan tokoh utama sebagai pusat cerita, film ini berupaya menghadirkan realitas keseharian yang jarang mendapat ruang representasi dalam media arus utama, khususnya mengenai bagaimana pekerja informal muda membagi waktu antara tuntutan akademik dan kebutuhan ekonomi. Kamera tidak hanya merekam aktivitas bekerja dan belajar secara fisik, tetapi juga menelusuri dimensi emosional dan psikologis tokoh, seperti kelelahan, dilema pilihan hidup, serta upaya mempertahankan motivasi di tengah stigma sosial terhadap profesi juru parkir. Pendekatan dokumenter ini memungkinkan penonton untuk memahami bahwa perjuangan tokoh utama bukan semata persoalan individu, melainkan berkaitan erat dengan hambatan struktural seperti ketimpangan akses pendidikan, minimnya perlindungan bagi pekerja informal, dan norma sosial yang meminggirkan kelompok tertentu. Dengan demikian, *Antara Jalan dan Harapan* tidak hanya berfungsi sebagai medium penceritaan personal, tetapi juga sebagai refleksi kritis atas realitas sosial yang lebih luas, sekaligus membuka ruang empati dan kesadaran publik terhadap narasi-narasi marjinal yang kerap terabaikan.

Guna menyajikan pengalaman tokoh secara otentik, karya ini memanfaatkan teori realisme, teori ini berupaya menampilkan realitas sebagaimana adanya melalui pengamatan langsung terhadap subjek. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan atau pengubahan cerita dari realitas yang sebenarnya, sehingga penonton dapat merasakan kedekatan dengan pengalaman nyata yang ditampilkan. Realisme dalam karya dokumenter juga berfungsi sebagai medium untuk membangun validitas emosional dan faktual terhadap representasi subjek. Selain itu, teori representasi digunakan untuk membongkar bagaimana identitas pekerja informal disajikan dalam media. Stuart Hall (1997) mengemukakan bahwa representasi bukan sekadar memantulkan realitas,

melainkan membentuk makna sosial dalam benak penonton. Melalui representasi yang lebih manusiawi, dokumenter ini berupaya menggeser perspektif publik mengenai juru parkir dari figur marginal menjadi simbol perjuangan, dedikasi, dan aspirasi terhadap pendidikan. Langkah ini penting karena representasi media memiliki pengaruh kuat terhadap konstruksi sosial, termasuk cara masyarakat memandang kelompok tertentu dalam struktur sosial.

Penelitian lain juga menyoroti bahwa pekerja informal memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan lanjutan dan perlindungan sosial (Cicich et al., 2022), sehingga kisah dalam dokumenter ini bukan hanya kasus individual, tetapi cerminan dari fenomena sosial yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa representasi yang tepat berperan dalam membuka ruang publik bagi isu-isu kelompok marginal agar tidak terus terpinggirkan secara sosial dan simbolik. Dengan demikian, film dokumenter ini bukan hanya menyajikan narasi personal mengenai perjuangan tokoh utama, tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk mendekatkan penonton pada isu ketimpangan ekonomi & pendidikan di kalangan pekerja informal. Karya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik bahwa pendidikan merupakan hak universal yang layak diperjuangkan oleh setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Dokumenter ini juga menguatkan gagasan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses panjang menuju perubahan sosial yang lebih adil.

1.2 Manfaat Penciptaan Karya

Adapun manfaat dari pembuatan karya ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penciptaan karya ini berkontribusi pada pengembangan kajian film dokumenter, khususnya dalam memahami bagaimana teori realisme dan teori representasi dapat diterapkan dalam proses penulisan naskah. Karya ini memperlihatkan bahwa naskah dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai pedoman produksi, tetapi juga sebagai perangkat konseptual yang membentuk cara realitas ditampilkan serta bagaimana subjek diposisikan secara sosial. Dengan menganalisis penerapan kedua teori tersebut, penelitian ini memperkaya khazanah akademik mengenai konstruksi makna dan autentisitas dalam praktik penciptaan film dokumenter.

1.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penciptaan karya ini bermanfaat bagi mahasiswa, pembuat film, maupun pembaca yang ingin memahami proses penyusunan naskah dokumenter berbasis riset dan teori. Karya ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah merancang naskah yang realistis, humanis, serta sensitif terhadap isu representasi sosial, khususnya terkait profesi juru parkir yang kerap mengalami stigma. Selain itu, melalui film yang dihasilkan, masyarakat diharapkan memperoleh sudut pandang baru mengenai realitas kehidupan juru parkir, sehingga dapat mengurangi prasangka dan menumbuhkan empati terhadap perjuangan mereka dalam konteks kehidupan perkotaan.

